



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu disusun Standar Biaya Umum di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2657);

[Handwritten signature]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

K. R. S. A. D.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran di Desa, baik berupa standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
4. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya kegiatan.
5. Harga Satuan adalah nilai satuan yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya kegiatan.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
10. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

[Handwritten signature]

11. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Pasal 2

Standar Biaya Umum adalah biaya masukan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa serta perubahannya dan turunannya.

BAB II STANDAR BIAAYA UMUM

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Tabalong untuk menyusun komponen biaya masukan dalam DPA, DPPA, DPAL, RAK.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi
- (3) Standar Biaya Masukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa yang tidak berpedoman sebagaimana tercantum pada standar biaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Kepala Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa atas penganggaran yang melebihi plafon dan diluar standar biaya yang telah ditetapkan dan merupakan bentuk kegiatan yang tidak terdapat dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Desember 2019

h. BUPATI TABALONG,

tttd.

ANANG SYAKHFIANI *h*

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

tttd.

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 59

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR **56** TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	HONOR PKPKD	OB	Rp. 500,000,-
2.	HONOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) - Koordinator	OB	Rp. 450.000,-
3.	Honorarium Ketua TPK : a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt	OK OK OK OK OK	Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 700.000,- Rp. 800.000,- Rp.1.000.000,-
4.	Honorarium Sekretaris TPK : a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt e. nilai pagu dana lebih dari Rp. 500 jt	OK OK OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 450.000,- Rp. 550.000,- Rp. 650.000,- Rp. 850.000,-
5.	Honorarium Anggota TPK : a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt	OK OK OK OK OK	Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 450.000,- Rp. 550.000,- Rp. 750.000,-
6.	Honorarium Tim Penyusunan RPJM Desa maksimal 7 (tujuh) orang. - Pembina (Kepala Desa) - Ketua (Sekretaris Desa) - Sekretaris (Ketua LPM) - Anggota (unsur dari Perangkat Desa, LPM, KPMD dan unsur masyarakat lainnya)	OK OK OK OK	Rp. 500.000,- Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-
7.	Honorarium Panitia Penyusun RKP Desa maksimal 7 (tujuh) orang. - Pembina (Kepala Desa) - Ketua (Sekretaris Desa) - Sekretaris (Ketua LPM) - Anggota (unsur dari Perangkat Desa, LPM, KPMD dan unsur masyarakat lainnya)	OK OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-

K. R. S. P. A. S. S.

8.	Honorarium Panitia Penyusun APBDesa maksimal 7 (tujuh) orang. - Pembina - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-
9.	Insentif Guru TK/PAUD/Taman Belajar Keagamaan milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Desa	OB	Rp. 400.000,-
10.	Insentif Kader Kesehatan	OB	Rp. 100.000,-
11.	Insentif Posyandu Balita	OB	Rp. 60.000,-
12.	Insentif Posyandu Lansia	OB	Rp. 100.000,-
13.	Insentif Pokja Desa	OB	Rp. 90.000,-
14.	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	Rp. 400.000,-
15.	Insentif Petugas Pos Kessos	OB	Rp. 200.000,-
16.	Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)	OB	Rp. 50.000,-
17.	Honor Petugas Kebersihan Kantor Desa (maksimal 1 orang)	OB	Rp. 500.000,-
18.	Honor Jaga Malam/Wakar Kantor Desa (maksimal 1 orang)	OB	Rp. 500.000,-
19.	Biaya snack/camilan harian Aparat Desa	OH	Rp. 5.000,-
20.	Snack/camilan Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya	Kotak	Rp. 10.000,-
21.	Makan siang/malam Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya	Porsi	Rp. 25.000,-
22.	Honor Panitia Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya (jumlah panitia maksimal sebanyak jumlah desa yang melaksanakan dengan keanggotaan berasal dari unsur desa dan ASN dari kecamatan): Ketua Sekretaris Anggota (Honor narasumber tersebut adalah total keseluruhan dari yang dianggarkan oleh desa-desa yang melaksanakan)	OK OK OK	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
23.	Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang dilaksanakan di Hotel : a. Fullday : - Pemakaian ruangan dari pukul 08.00-18.00 wita - Makan siang 1 kali dan snack 2 kali	OHP	Rp. 200.000,-

Handwritten signature and initials in blue ink.

	b. halfday : - Pemakaian ruangan dari pukul 08.00-14.00 wita - Makan siang 1 kali dan snack 1 kali harga sudah termasuk Pajak	OHP	Rp. 150.000,-
24.	Honor Narasumber Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan Desa : Eselon II Eselon III Eselon IV/Golongan III keatas (Honor narasumber tersebut adalah total keseluruhan dari yang dianggarkan oleh desa-desa yang melaksanakan)	OJ OJ OJ	Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,- Rp. 750.000,-
25.	Uang saku / harian peserta Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya		50 % dari uang harian memakai Indeks Biaya Perjalanan Dinas
26.	Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi		Maksimal 10% dari Operasional Pemerintahan Desa
27.	HONORARIUM PANITIA PENYUSUN BUKU PROFIL DESA (maksimal 7 orang) Penanggungjawab (Kades) Ketua (Sekdes) Sekretaris (Kasi/kaur) Anggota (Kaur/Kasi orang)	OK OK OK OK	Rp. 225.000,- Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-
28.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (maksimal 7 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 1.000.000,-
29.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-
30.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (maksimal 7 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-

31.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN BPD ANTAR WAKTU (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-
32.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA DAN STAF PADA PEMERINTAH DESA (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-
33.	HONOR PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA (LPPD DAN LKPPD) (maksimal 7 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
34.	HONOR PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA (LPPD DAN LKPPD) AKHIR MASA JABATAN (maksimal 7 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-
35.	BIAYA MAKANAN BALITA UNTUK KEGIATAN POSYANDU	Porsi	Rp. 7.500,-
36.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4 (ambulan, mobil angkutan sampah, mobil pemadam)	Unit/th	Rp. 5.000.000,-
37.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 3 (maksimal)	Unit/th	Rp. 2.500.000,-
38.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (Sepeda motor) maksimal	Unit/th	Rp. 1.500.000,-

Keterangan :

OB = Orang per bulan

OK = Orang per kegiatan

OHP = Orang per hari per paket

OJ = Orang per jam

PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium yang diberikan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan pada setiap satuan kerja diberi berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala desa bertanggungjawab terhadap seluruh Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada PPKD dan TPK;
 - c. PKPKD/PPKD menerima honorarium maksimal 11 (sebelas) bulan dan sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan, sedangkan TPK dibayar per kegiatan;

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
 - a. Honorarium TPK paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan yang dikelola;
 - b. Honorarium diberikan kepada Anggota TPK yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, dan melalui penyedia barang/jasa (pihak ketiga) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Honorarium Anggota TPK diberikan per kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening belanja modal pada setiap kegiatan yang dikelolanya.
 - d. Tenaga Teknis/Tim Pendukung
Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah Desa dimana memerlukan keahlian khusus, maka dapat melibatkan tenaga pendamping profesional yang tergabung dalam P3MD.

3. Honorarium Tim Perencanaan Desa, Tim Anggaran Desa dan Tim Penyusun Laporan Pemerintah Desa.

Honorarium hanya diberikan kepada tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang diberi tugas diantaranya melakukan penyusunan RPJMDes /RKPDDes/RKPDDesP, APBDes/APBDesP, LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan, LKPPD dan Profil Desa.

4. Honorarium Narasumber/Panitia.
Honorarium narasumber dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi kegiatan.

Catatan:

1. satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar /sosialisasi/ bimbingan teknis/penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan adalah 60 (enam puluh) menit.
2. narasumber dengan ketentuan :
 - a. berasal dari lembaga pemerintah yang berkompeten;
 - b. berasal dari Badan/Lembaga Non Pemerintah yang sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian/Lembaga Negara yang membidangnya; dan
 - c. melampirkan paparan/materi yang akan disampaikan.

Honorarium Panitia yang diberikan kepada Anggota Panitia yang diberi tugas oleh Kepala Desa/Perwakilan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas melaksanakan kegiatan seminar /sosialisasi / bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

5. Honorarium Petugas Khusus.

Honorarium yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada seseorang yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu seperti Narasumber pelatihan pengurusan jenazah, penceramah, dan lain-lain. Honorarium sudah termasuk uang transport dan besaran tarif disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum.

6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada unsur dari Aparatur Pemerintah Desa dan unsur dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terlibat dan berkontribusi langsung dalam proses/pencapaian *output* kegiatan.

7. Honorarium Tim Penyusunan/Pembahasan Rancangan Produk Hukum Desa.

Produk hukum desa adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Desa adalah Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan Tim Pembahasan Rancangan Produk Hukum Desa adalah Tim Pembahas Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Kepala Desa, dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| a. Penanggungjawab | : Kepala Desa |
| b. Ketua | : Sekretaris Desa |
| c. Sekretaris | : Kasi dan Kaur yang membidangi |
| d. Anggota | : Kasi dan Kaur |

Honorarium diberikan untuk tiap produk hukum yang disusun/dibahas.

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Desa/atau Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

8. Satuan Biaya Snack Aparatur Pemerintah Desa

Snack diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling banyak per Aparatur Pemerintah Desa 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Satuan Uang snack ini merupakan batas tertinggi dalam penyediaan snack Aparatur Pemerintah Desa.

L. BUPATI TARALONG, *y*
ttd

ANANG SYAKHFANI *hr*

Handwritten signature

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK *)
NOMOR :

Kode dan Nama Satuan Kerja :
Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Umum**) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati Tabalong.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,
.....

*) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak beserta data dukung dilampirkan pada saat Evaluasi APBDesa.
**) Diisi nama kegiatan yang Menjadi Standar Biaya Umum.

↳ BUPATI TABALONG, y
ttd
ANANG SYAKHFANI Mh

Handwritten signature at the bottom right of the page.